

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Menurut Ki Hajar Dewantara, Pendidikan merupakan sebuah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya (Rahardjo, 2009). Menurut Nelson Mandela, senjata yang paling canggih di zaman modern yang harus dikuasai pemuda ialah ‘pendidikan’ yang dapat mengubah dunia (Limb, 2009)

Salah satu amanat yang telah disepakati para pendiri bangsa ketika membangun bangsa ini yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada alinea ke-4, bahwa sebuah bangsa wajib ‘mencerdaskan kehidupan bangsa. Arti bangsa disini ialah semua rakyat Indonesia termasuk kaum petani, nelayan, peneliti hingga politisi. Suatu bangsa harus mencapai suatu negara yang memiliki intelektualitas demi menghindari hal-hal yang mistis (kepercayaan non- science). Negara juga harus mengupayakan tercapainya kecerdasan kolektif seperti terbentuknya empati terhadap sesama, memperluas jejaring, hingga perasaan hormat terhadap orang lain

Visi Indonesia emas di tahun 2045, seratus tahun paska kemerdekaan, mencanangkan agar Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur dengan menjadikan Indonesia sebagai ‘pusat pendidikan’, teknologi, dan peradaban di dunia (Bappenas, 2019). Dalam rangka pembangunan sumber daya manusia Indonesia, Bapenas menetapkan 5 strategi peningkatan untuk membangun pendidikan antara lain; kualitas dan layanan pendidikan yang merata; peran masyarakat, profesionalisme guru dalam perubahan metode pembelajaran, budaya sekolah serta pendidikan vokasi, entrepreneurship dan karakter.

Demi mewujudkan semua itu, bangsa besar ini memerlukan sistem pendidikan yang unggul yang sesuai dengan potensi dan karakteristik bangsa kita. Kurikulum berperan vital sebagai jantung suatu sistem pendidikan itu. Indonesia sudah mengalami perubahan kurikulum sebanyak 11 kali sejak proklamasi kemerdekaan

(Aprima, 2022). Pada tanggal 10 Desember 2019, Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI mengubah dan menetapkan kurikulum merdeka yang merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 2013 (Rahmadayanti, 2022).

Latar belakang dari munculnya kurikulum baru ini ialah demi mengejar ketertinggalan Indonesia yang sudah berlarut-larut terjadi. Berdasarkan skor PISA (Programme for International Student Assesment), yang dirilis oleh Organization for Economics Cooperation and Development/ OECD, Indonesia menempati posisi urutan 64 untuk skor membaca, 73 untuk skor numerasi dan posisi 71 dalam sains dari total 74 negara yang dinilai/ disurvei (Harususilo, 2019; Mahdi, 2022). Dalam Qurtobi (2020) mengatakan bahwa memang kita tidak dapat menutup mata dari suatu fakta bahwa tingkat pendidikan di Indonesia masih cukup rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara jika dilakukan studi perbandingan melalui berbagai metode yang berbeda-beda (historis, deskriptif, statistik, filosofis, komparatif bahkan metode *Quasi- experimental*) diantara negara berkembang maupun ditengah negara maju.

Momentum pandemi yang mengguncang dunia tentunya juga berdampak besar pada sektor pendidikan. Learning loss/ keterlambatan pembelajaran menjadi hal yang paling ditakutkan ditengah pandemi ini, walaupun bangsa ini telah mengalami learning loss sejak lama sebelum pandemi yang dapat dibuktikan dengan tingkat pendidikan nasional yang masih berada di jajaran terbawah jika dibandingkan dengan negara tetangga. Hal ini justru dapat menjadi momen tepat untuk membenahi struktur dan landasan penting dunia pendidikan yakni kurikulum. Hal ini terbukti dalam penelitian Jojo (2022) yang membuktikan penerapan Kurikulum Merdeka di tingkat satuan pendidikan dapat mengurangi Learning loss selama pandemi COVID-19. Nugraha (2022) juga membuktikan dalam penelitiannya bahwa Kurikulum Merdeka mampu mengubah paradigma pembelajaran/ peralihan dari offline menjadi online dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 2 hal ini membuktikan bahwa momentum covid dapat dijadikan salah

satu faktor yang cukup berdampak pada perubahan paradigma pembelajaran khususnya di dunia pendidikan untuk terus berbenah.

Konsep Kurikulum Merdeka juga biasa disebut dengan “Merdeka Belajar” ini banyak mendapat respons positif ditengah peluncurannya ditengah pandemi covid-19 yang mengubah paradigma dan sistem pembelajaran di Indonesia (Sunarni, 2023). Walaupun Kurikulum ini masih bersifat pilihan yang tidak wajib diterapkan hingga tahun 2024, namun, hal ini dinilai dapat dijadikan solusi dalam pembenahan masalah pendidikan dan juga menjadi strategi pengembangan pendidikan nilai karakter bangsa untuk menjadi berguna di masyarakat karena konsep mengandung ide merdeka belajar. (Aina, 2020; Hattarina, 2022). Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) ini nyatanya lebih baik dan sesuai dengan kultur pendidikan Indonesia dibandingkan Kurikulum 2013 (Angga, 2022). Kurikulum ini juga mengikuti dan berhubungan dengan model pembelajaran abad ke-21 di tengah perkembangan era society 5.0 yang membutuhkan keterampilan 5C, yaitu critical thinking, communication, colaboration, creativity, dan character (Indarta. 2022).

Konsep Kurikulum Merdeka ini juga selaras dengan konsep progresivisme pendidikan karena setiap anak dihargai atas jasanya menyelesaikan masalah berdasarkan pengalamannya dengan tidak mengejar target wajib/ standar minimal (KKM) dengan cara yang mengasikan. (Yunaini, 2022). Implementasi Kurikulum Merdeka ini sudah diuji coba sejak 2021 pada kurang lebih 2500 satuan pendidikan yang tersebar di 34 Provinsi, bahkan IKM ini dinilai lebih baik dibanding Kurikulum 13 jika diterapkan pada masa pandemi. (Fitriyah, 2022).

Ditengah konsep IKM yang sangat baik, hal ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan yang ada karena Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang dikenal baik dalam merencanakan suatu konsep (mulai dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, hingga GBHN), tapi tidak pada implementasinya. (Nugroho, 2021). Pada kurikulum sebelumnya, K13 Revisi yang dinilai masih belum optimal dalam implementasinya di berbagai sekolah, namun, sudah ada peluncuran kurikulum baru yang benar-benar akan mengubah paradigma pembelajaran. (Mulyasa, 2021;

Angga, 2022). Rendahnya kualitas pendidikan bahkan salah satunya disebabkan oleh faktor perubahan kurikulum yang terlalu membingungkan dan terlalu kompleks yang tidak sesuai pada kebutuhan utama bangsa Indonesia (Fitri, 2021; Kurwiawati, 2022; Yunus, 2021).

Faktor kurangnya pengetahuan guru, kurangnya antusiasme, hingga penolakan juga menjadi tantangan yang besar dalam suksesnya implementasi kurikulum baru ini. (Feriyanto, 2022; Sunarni, 2023; Jusuf, 2022; Fitriyah. 2022). Penerapan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar, juga dinilai terlalu dipaksakan, hal ini terbukti dari temuan penelitian Aprima (2022) yang menilai masih banyak terdapat berbagai kekurangan dari segi administrasi proses pembelajaran, seperti penyusunan rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran saintifik, dan evaluasi pembelajaran.

Masih banyaknya tenaga pendidik yang belum memahami secara komprehensif ide kurikulum Merdeka juga konsep tentang sekolah penggerak sehingga tidak dapat mengimplementasikan pembelajaran sesuai ide itu (Alfaeni, 2022; Nurmitasari. 2022). Sekolah penggerak merupakan sebutan bagi sekolah yang dinilai sudah mampu melaksanakan kurikulum merdeka itu secara utuh/ penuh. Sekolah penggerak ini nantinya akan diberikan intensif/ dana bantuan tambahan untuk semakin mendukung kelancaran proses pelaksanaan kurikulum ini demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan Nadiem Makarim. Namun, hal pemberian dana bantuan pada program ini sayangnya dinilai melanggar prinsip

pendidikan yang adil dan merata (non-diskriminatif dalam pasal 4 UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional/ UU Sisdiknas. Jika hal ini tidak dikaji dan dibenahi lebih lanjut, apa yang akan terjadi kemungkinan besar akan mengulangi kegagalan yang sama pada kebijakan sebelumnya yakni Program Sekolah Bertaraf Internasional (PSBI)

Hal ini tentunya akan sangat memberatkan bagi beberapa sekolah yang dinilai belum memiliki kematangan/ kesiapan dalam mengimplementasikan IKM sejak

pertama disosialisasikan jika diberlakukan secara nasional. (Feriyanto, 2022; Jusuf, 2022; Aprima, 2022; Angga. 2022). Hal ini terbukti dari data yang dihimpun dalam website resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek, 2023), per Februari 2023, baru terdapat 843 sekolah dasar yang berkategori sekolah penggerak dari total 18.732 sekolah dasar yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah. Jika mengacu pada data secara nasional, baru terdapat 6.039 sekolah dasar yang berkategori sebagai sekolah penggerak yang tersebar secara nasional dari total sekolah dasar di Indonesia sebanyak 149.454 (Kemdikbud, 2023).

Memang konsep di dalam Program Sekolah Penggerak, sekolah memiliki otonomi untuk berekspropsi yang langsung didampingi oleh Kemendikbud supaya guru tidak kebalasan atau takut salah dalam mengambil sikap demi tuntutan tanggung jawab, namun, hal ini juga menimbulkan tanda tanya besar terkait proses implementasi di lapangan yang tidak sesuai harapan (Barlian, 2022). Hal ini terjadi karena ada 16 syarat/ standar minimum (umum dan khusus) yang harus dipenuhi suatu sekolah untuk lolos dalam hal administratif seperti mampu memimpin perubahan, memiliki daya juang dan kematangan beretika, mampu memimpin implementasi, mendorong inovasi dan sebagainya. (Kemendikbudristek, 2023)

Perkembangan zaman dan teknologi memang tidak dapat kita hindari ditengah kepingan globalisasi saat ini. Banyak hal yang harus berubah untuk beradaptasi seiring berkembangnya zaman, tak terkecuali Kurikulum di Indonesia yang harus terus bertransformasi mengejar demi menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman. Namun, hal ini tidak senada dengan pandangan Riant Nugroho dalam Nugroho (2018) yang menyebut kurikulum yang dicobakan kepada anak-anak hanya bersifat “test the water”, kalau gagal diganti; kalau berhasil diteruskan.

Proses transparansi pembuatan kurikulum juga banyak dipertanyakan mengingat alasan dan tujuan dasar pembuatan kurikulum baru itu dinilai belum dapat mengatasi kesenjangan sosial pendidikan di di seluruh pelosok negeri yang secara optimal (Administration Elite Based). Sempat terjadi perbedaaan pandangan antara

Pemerintah (Kemendikbudristek) yang hendak membuat opsi untuk sekolah mewajibkan menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar menggantikan Kurikulum 2013 dengan DPR RI yang menghasilkan pandangan untuk tidak mewajibkan kurikulum merdeka karena masih mempertimbangkan banyak aspek (boleh menerapkan juga boleh tidak tergantung kesiapan tiap sekolah). Proses implementasi memang harus ada sosialisasi dulu yang mempertimbangkan timing, tidak boleh terburu-buru.

Jika kita sudah mempunyai konsep yang baik, maka 60% keberhasilan sudah di tangan. Namun yang 60% itu pun akan hangus jika 40% implementasinya tidak konsisten dengan konsep. Malangnya lagi banyak peneliti yang menemukan bahwa dari konsep- konsep perencanaan, rata-rata konsisten implementasinya antara 10-20% saja. (Nugroho, 2021). Akankah kurikulum baru ini mengatasi masalah prioritas dalam bidang pendidikan seperti kesenjangan tenaga pendidik, sarana prasarana dan pengawasan alokasi dana daerah yang rendah? (Syahrani, 2019; Hidayat, 2017). Apakah kurikulum yang digodok pemerintah ini dapat mengatasi learning loss di tengah keterpurukan tingkat pendidikan Indonesia serta mengadaptasi IPTEK yang menjadi salah satu masalah krusial di dunia pendidikan ? (Sista, 2018; Nugraha, 2022)

Provinsi Jawa Tengah meningkat posisi ketiga yang memiliki Sekolah Dasar terbanyak dari total 34 Provinsi di Indonesia yakni sebanyak 18.732 dibawah Provinsi Jawa Barat disusul Jawa Timur (Kemdikbud, 2023). Namun, sayangnya per April 2023, baru terdapat 843 dasar yang berkategori sekolah penggerak di Provinsi Jawa Tengah dan hanya terdapat 31 sekolah dasar yang berkategori sekolah penggerak dari total 584 sekolah dasar yang tersebar di Kabupaten Boyolali. (Kemendikbudristek, 2023). Hal ini juga terjadi di beberapa Kabupaten di Jawa Tengah yang hanya memiliki puluhan jenis sekolah penggerak dari ribuan total sekolah jenjang SD. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan bagi penulis untuk lebih mengkaji dan meneliti kesiapan implementasi kurikulum baru ini. Kesiapan IPTEK, para tenaga pendidik, keadaan sarana prasarana/ fasilitas

pendidikan juga patut diuji demi tercapainya IKM secara optimal di Kabupaten Boyolali.

Pengaruh IPTEK juga dapat mendukung atau menghambat keberhasilan dari suatu kebijakan, tak terkecuali kebijakan kurikulum di dunia pendidikan (Ramadhan, 2022) Seperti pada contohnya, jumlah WIFI umum yang tersebar di Kabupaten Boyolali juga masih sangat minim, namun, Pemerintah Kabupaten Boyolali telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 1.883.000.000 untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) pelaku IKM dalam hal pelatihan di dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026. (Pembab Boyolali, 2021). Hal ini menjadi salah satu isu strategis jangka panjang dalam penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005- 2025 di Kabupaten Boyolali karena masih rendahnya kualitas SDM dari aspek pendidikan karena kurangnya pemanfaatan infrastruktur dan IPTEK. Hal ini menarik untuk ditelisik lebih lanjut karena masih kurangnya data penelitian terkait topik pendidikan di Kabupaten Boyolali, maka dari itu, peneliti memilih tempat penelitian di Kabupaten Boyolali demi menguji kesiapan Implementasi Kurikulum Merdeka di Jenjang Sekolah Dasar.

Dalam membantu para tenaga pendidik untuk lebih memahami esensi kurikulum merdeka, Kemendikbudristek menyediakan wadah yang dinamakan “Platform Merdeka Mengajar”. Wadah ini merupakan alat bantu berupa materi pengajaran, video inspirasi mengajar, bahan uji kompetensi, wadah berbagi komunitas pengajar, dan hal-hal dasar lainnya terkait profil pelajar pancasila, capaian pembelajaran dan beberapa dokumen. Namun, dalam penelitian yang dilakukan Zzulfa (2022), ditemukan fakta bahwa ada keterbatasan limit jumlah pengunjung/kuota dalam mengakses platform itu yang mengakibatkan kurang optimalnya guru sebagai tenaga pengajar dalam memanfaatkan platform merdeka mengajar, oleh karena itu, penting untuk segera dilakukan studi terkait kesiapan implementasi kurikulum merdeka ini.

Penulis sudah memberikan data terkait statistik perbandingan tingkat pendidikan di Kabupaten Boyolali dengan daerah Kabupaten dan sekitarnya pada bagian Statistik Kondisi Pendidikan di Kabupaten Boyolali (Lihat bagian 2.2). Telah dijelaskan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Boyolali yang dipakai untuk menunjukkan banyaknya siswa/i yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu, berada di bawah rata-rata Jawa Tengah. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya partisipasi anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu di Kabupaten Boyolali. Data Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah di daerah sentra penghasil susu dan daging ini juga berada pada urutan 3 terbawah dari total 8 Kabupaten yang dibandingkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten ini juga menempati peringkat 4 dari 8 kabupaten yang dibandingkan walaupun rata-rata pengeluaran per kapita kabupaten ini paling tinggi daripada kabupaten lainnya. Penulis dapat menyimpulkan bahwa **Kabupaten Boyolali tergolong rendah dalam kualitas pendidikan dan SDMnya,**

Setidaknya hingga bulan Juni 2023, baru terdapat 31 Sekolah Dasar yang berkategori penggerak di Kabupaten Boyolali dari total 584 total sekolah yang diakses dari web Kemendikbud. Dari total 22 jumlah kecamatan di Kabupaten Boyolali, sudah ada 16 Kecamatan yang terdapat sekolah penggerak. Sekolah-sekolah inilah yang nantinya diharapkan dapat menjadi model/ rujukan untuk dapat dicontoh sekolah-sekolah di sekitarnya dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka.

Dalam rangka peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan yang menjadi bagian di dalam Rencana Strategis Pendidikan di Kabupaten Boyolali, Bupati Boyolali, M. Said Hidayat, telah menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali untuk dapat menempatkan Guru baru (PNS) yang lolos seleksi di daerah Ring 3 (terjauh) seperti Kecamatan Juwangi, Wonosamodro, Wonosegoro, Musuk ketimbang di Ring 1 (daerah jalan utama Solo- Semarang). Hal ini menyebabkan banyaknya guru dan kepala sekolah yang berusia muda yang tersebar di pinggiran kawasan Kabupaten Boyolali yang cenderung jauh dari Kota.

Kebijakan ini dibuat dalam rangka percepatan peningkatan pendidikan melalui tenaga pendidik yang cenderung lebih melek teknologi untuk menunjang implementasi Kurikulum Merdeka.

Peneliti juga tertarik mengambil topik penelitian yang berkaitan dengan jenjang Sekolah Dasar karena merupakan tahap paling awal dalam jenjang sekolah formal, dimana siswa pada usia emas/ *Golden Age* dan puncak pertumbuhan/ *Growth Spurt*, dimana siswa/i sudah mulai ‘merekam’ konsep dan pengetahuan kedalam memori jangka panjang maupun jangka pendek. Apabila pendidik salah konsep dalam mendidik anak SD, maka akan berakibat fatal. Anak SD akan menerima secara utuh apa yang guru sampaikan dan terbawa sampai pendidikan selanjutnya. (Mustadi, 2020). Isjoni juga menyebutkan bahwa pendidikan dasar sebagai sebuah “paspor” yang sangat diperlukan individu untuk hidup dan mampu memilih apa yang mereka lakukan, mengambil bagian dalam pembangunan masyarakat masa depan secara kolektif serta untuk dapat terus belajar secara berkelanjutan. (Isjoni dalam Mustadi, 2020). Maka dari itu, masa subur dalam memompa potensi yang mereka miliki menjadi sangat penting untuk mempersiapkan mereka mengikuti pendidikan pada jenjang berikutnya sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan (Shohibirin, 2016).

Peneliti juga akan mendalami hubungan kurikulum merdeka ini dengan kualitas mengajar yang dilakukan oleh para guru. Walaupun perubahan kurikulum merupakan hal yang wajar seiring perkembangan zaman demi pembenahan sektor pendidikan, namun, jika guru tidak mengerti tugas dan tanggung jawab barunya, maka perubahan kurikulum itu sangat sia-sia. (Shohibirin, 2016; Mulyasa, 2021). Jika melihat kebelakang, kurikulum sebelumnya yakni Kurikulum 2013 sempat mengalami kegagalan hingga diberhentikan pelaksanaannya secara parsial dalam lingkup nasional karena 15 alasan, 3 diantaranya ialah guru belum paham konsep, guru belum siap, dan guru hanya jadi robot dalam pelaksanaan kurikulum baru ini (Lutfi. M, 2013). Anies Baswedan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu penarikan implementasi kurikulum 2013 secara nasional, mengaku bahwa keputusan ini dilakukan karena telah ditemukan sejumlah masalah dalam

kesiapan buku, sistem penilaian, penataran guru, pendampingan guru serta kesiapan kepala sekolah, padahal Anies Baswedan berharap Kurikulum 2013 lalu dapat terus berjalan, karena yang menjadi akar masalah ialah sistem/ metode pembelajaran dan kualitas guru sebagai ujung tombak keberhasilan (Tempo, 2022)

Jika ingin menarik kembali ke beberapa dekade yang lalu, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2004, juga sempat mengalami kegagalan secara internal dalam proses pelaksanaan di lapangan karena faktor belum siapnya guru dan kepala sekolah untuk mengetahui masalah di masyarakat (Lutfi, 2013). Rendahnya kualitas guru disebabkan oleh kurangnya kesejahteraan guru yang dapat berdampak pada kurangnya kreativitas pembelajaran di kelas (Yunus, 2021). Hal ini semakin menarik untuk dicermati, khususnya terkait kunci keberhasilan pada sektor pendidikan itu terletak pada faktor “daya dukung” atau “kurikulum ?” Terlepas dari semua masalah yang ada, tenaga pendidik memang memiliki peran penting karena guru yang berkualitas dapat mengolah kurikulum buruk menjadi bahan pelajaran yang baik bagi siswa.

1. 2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesiapan Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka yang tertuang dalam Permendikbudristek No. 262/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran pada Jenjang Sekolah Dasar kategori penggerak di Kabupaten Boyolali ?

1. 3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- A. Untuk menganalisis kesiapan implementasi kurikulum merdeka di Kabupaten Boyolali.

B. Untuk menganalisis hubungan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka jenjang SD di Kabupaten Boyolali

C. Untuk menganalisis pola hubungan komunikasi dan kolaborasi antar aktor kepentingan dan pemangku kebijakan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka jenjang SD di Kabupaten Boyolali

1. 4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Bagi masyarakat, sebagai sumber pengetahuan untuk mengetahui implementasi kurikulum merdeka di jenjang SD di Kabupaten Boyolali

B. Bagi peneliti, sebagai sarana pembelajaran dan menambah pengetahuan

C. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan memberi sumbangan ilmu baru dalam dunia pendidikan

1. 5 Penelitian Terdahulu

A. Pada penelitian yang pertama, penulis hendak mengetahui implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan, **Feriyanto (2022)**, dari hasil observasi yang dilakukan pada Sekolah Negeri Mojoroto yang berada di Jetis, Mojokerto, guru SDN Mojoroto masih kesulitan dalam memahami kurikulum baru ini karena dirasa masih baru dan belum ada sosialisasi dari pihak manapun. Implementasi sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi dan komunikasi. Tantangan penerapan kurikulum merdeka antara lain: kesiapan kompetensi, ketrampilan, pola pikir guru sebagai pelaksana pendidikan, kesiapan infrastruktur serta sarana prasarana yang akan digunakan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini berhasil mengungkap kekurangan dari implementasi kurikulum baru ini berdasarkan fakta di lapangan, namun, sayangnya belum dapat mengaitkan menjelaskan pola komunikasi dan

kolaborasi antar tenaga pendidik di SDN Mojoroto dan pemangku kebijakan sebagai subjek penelitian.

B. Selanjutnya peneliti hendak mendalami penelitian terdahulu yang membahas terkait manajemen jaringan dalam konteks kebijakan perkawinan anak di Kabupaten Maros. Hasil penelitian **Rezeki (2022)** menunjukkan beberapa poin penting sebagai berikut :

- **Struktur Jaringan:** Terdapat dua model struktur jaringan yang digunakan dalam manajemen kebijakan perkawinan anak di Kabupaten Maros, yaitu self governance dan lead organization. Model self governance digunakan oleh instansi pemerintah, sedangkan model lead organization digunakan oleh organisasi non-pemerintah. Ini mencerminkan kerja sama multiaktor yang kompleks dalam mengelola jaringan kebijakan.
- **Komitmen Terhadap Tujuan:** Instansi yang terlibat dalam jaringan memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan bersama, yaitu pencegahan perkawinan anak. Mereka melakukan berbagai upaya, seperti edukasi, sosialisasi, dan penanganan masalah perkawinan anak secara efektif. Seluruh pihak berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama ini.
- **Kepercayaan Antar Partisipan:** Kepercayaan antara partisipan dalam jaringan sangat penting. Instansi dan lembaga terlibat mempercayai satu sama lain dalam menyampaikan informasi dan usaha untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini dibangun melalui hubungan profesional dan sosial serta koordinasi yang baik.
- **Akses Terhadap Kekuasaan:** Setiap instansi dan lembaga dalam jaringan memiliki otoritas dan prosedur yang jelas. Mereka memiliki akses terhadap kekuasaan untuk mengimplementasikan keputusan dan kebijakan yang

telah disepakati bersama. Hal ini memungkinkan jaringan untuk berfungsi secara efisien.

Dalam keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya manajemen yang efektif dalam jaringan kebijakan multiaktor. Keberhasilan dalam mencegah perkawinan anak di Kabupaten Maros didasarkan pada kolaborasi, komitmen, kepercayaan, dan akses terhadap kekuasaan yang kuat antara berbagai instansi dan lembaga yang terlibat dalam jaringan ini.

C. Jusuf (2022), Penelitian ini merupakan eksperimen yang dilaksanakan secara online dalam bentuk bimbingan teknis kepada para guru dan kepala sekolah dari total 4 Sekolah Dasar yang dijadikan sampel penelitian. Penelitian ini menghasilkan suatu fakta bahwa walaupun sudah dilakukan Bimtek (bimbingan teknis) kepada 4 sekolah (perwakilan 3 guru dari tiap sekolah), namun, masih terdapat guru yang tidak paham dalam membuat dan menyusun asesmen P5 (Penguatan Proyek Profil Pelajar Pancasila) yang terintegrasi dengan Mata pelajaran. Belum semua memahami secara utuh tentang paradigma baru dalam proses pembelajaran dengan kurikulum merdeka yang akan dilaksanakan tahun ajaran 2022/2023, sebagian belum memahami bagaimana membuat dan menyusun proyek profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran, bagaimana membuat atau menyiapkan asesmen proyek profil pelajar pancasila dan mengemasnya menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dengan mata pelajaran. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum pengembangan dari kurikulum prototipe, dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial serta pengembangan karakter dan kompetensi siswanya.

Penelitian ini sudah cukup berhasil menggali fakta di lapangan melalui eksperimen bimbingan pelatihan pada 4 sekolah dasar yang masih mengalami beberapa kendala dilapangan, namun, masih ada kekurangan dalam hal metodologi penelitiannya yang tidak menyebutkan sampel dan situs penelitian yang diambil. Penelitian ini juga belum mengaitkan hubungan antara perubahan kurikulum terhadap kolaborasi dan komunikasi antar kenaga pendidik yang berjumlah 12 orang.

D. Pada penelitian selanjutnya, penulis hendak mendalami terkait manajemen jaringan/ manajemen network yang membahas terkait implementasi kebijakan sektor publik pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hasil dari penelitian Nahrawi (2021) ialah Program MARASA (Mandiri, Cerdas, dan Sehat) melibatkan berbagai aktor dari tingkat Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa, serta unsur tenaga pendamping profesional dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Koordinasi lintas sektor ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan program MARASA.

- **Efisiensi vs Inklusivitas:** Program MARASA melibatkan banyak aktor dari berbagai sektor, yang bisa menghasilkan efisiensi dalam pengambilan keputusan administratif. Namun, keterlibatan banyak aktor juga membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih besar dalam koordinasi. Oleh karena itu, keterlibatan aktor dalam jaringan harus didukung dengan pemahaman dan aksi yang inklusif untuk mencapai efektivitas.
- **Legitimasi Internal vs Eksternal:** Legitimasi internal dalam jaringan mengacu pada nilai jaringan bagi anggotanya, sedangkan legitimasi eksternal mengacu pada harapan dari organisasi di luar jaringan. Dalam program MARASA, legitimasi internal belum mencapai potensinya sepenuhnya, tetapi terdapat komitmen dari beberapa aktor OPD untuk berkontribusi. Diperlukan peningkatan koordinasi dan komunikasi dalam jaringan untuk memperkuat legitimasi.
- **Fleksibilitas dan Stabilitas:** Jaringan dalam program MARASA menunjukkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan eksternal, seperti penyesuaian skema kegiatan akibat pandemi. Fleksibilitas ini penting untuk menjawab isu-isu yang muncul. Meskipun jaringan ini fleksibel, perubahan struktural tetap dilakukan untuk menjaga stabilitas jaringan.
- **Hambatan dalam Adopsi Network Governance:** Adopsi model pengelolaan jaringan (network governance) dalam program MARASA

lebih menekankan efisiensi, stabilitas, dan keseimbangan legitimasi. Namun, ada hambatan dalam mengatasi perbedaan prosedur antara organisasi individu dan organisasi sebagai anggota jaringan. Diperlukan pemahaman menyeluruh tentang mekanisme di antara keduanya untuk mengatasi tantangan ini.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan publik melalui mekanisme jaringan dalam program MARASA belum optimal. Diperlukan penguatan entitas perantara jaringan (Network Administrative Organization - NAO) untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas. Selain itu, diperlukan komitmen yang lebih merata dari semua aktor dalam jaringan untuk mencapai tujuan program dengan lebih efektif.

E. Zahir (2022), Penelitian ini menggunakan metode eksperimen lapangan dalam bentuk sosialisasi/ bimbingan teknis kepada total 651 peserta (473 guru, 167 kepala sekolah, dan 11 pengawas) di 4 tempat yang berbeda selama 3 hari berturut-turut. Impelementasi kurikulum merdeka ini melalui bantuan bimbingan teknis menghasilkan peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan peserta.

Penelitian ini menghasilkan fakta unik yakni terbukti semakin banyaknya Satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar yang akan menerapkan Kurikulum Merdeka di kabupaten Luwu Timur akan menimbulkan banyak permasalahan dalam implementasinya, terkecuali 8 SD yang termasuk dalam sekolah penggerak. Hal ini membuktikan belum siapnya tenaga pendidik dalam mengimplementasikan kurikulum baru ini dalam waktu dekat.

Benang merah yang dapat diambil oleh penulis adalah mayoritas sekolah belum siap dalam mengimplementasikan Kurikulum baru ini. Ketidaksiapan ini diakibatkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pengetahuan tenaga pendidik, sarana/ prasarana yang belum memadai hingga faktor internal berupa minimnya dukungan dari pelaksana di lapangan. Beberapa sekolah dinilai sudah siap melaksanakan kurikulum ini yakni beberapa sekolah yang berkategori sekolah penggerak yang ditetapkan melalui

surat keputusan menteri. Masih kurangnya penelitian terhadap efektivitas perubahan kurikulum ini dalam implementasinya yang mengikutsertakan efektivitas melalui jaringan komunikasi dan kolaborasi antar tenaga pendidik dan pemangku kepentingan juga masih menjadi hal yang harus dikaji lebih lanjut. Jangan sampai perubahan kurikulum ini menjadi batu loncatan bagi dunia pendidikan di tanah air ditengah terpuruknya tingkat pendidikan di Indonesia saat ini.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

Peneliti akan menggunakan 2 kerangka teori dalam menganalisis kesiapan tenaga pendidik di Kabupaten Boyolali yakni Teori Manajemen Network/ Manajemen Jaringan

1.6.1 Teori Manajemen Network

Konsep network/ jaringan merupakan frasa yang menarik bagi penulis untuk membahas kesiapan tenaga pendidik di satuan pendidikan dalam implementasi kebijakan kurikulum merdeka di Kabupaten Boyolali. Teori ini dapat dipakai pada berbagai level aktivitas seperti memformulasi, implementasi kebijakan dan program pelayanan publik secara efektif dan efisien melalui Sumber daya yang tersedia secara bersama. Sifat jaringan ini yang memungkinkan terciptanya efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi seperti halnya di satuan pendidikan. Tenaga pendidik, kepala sekolah, orang tua siswa dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali memiliki pola jaringan yang saling terkait satu dengan yang lain dan tidak dapat terpisahkan demi mencapai tujuan bersama.

Konsep Jaringan/ Network seringkali dipakai oleh akademisi dan pemangku kebijakan untuk saling memenuhi keterbatasan Sumber daya yang masing-masing mereka miliki. Dalam mengatasi kelangkaan sumber daya bersama itu, biasanya para aktor kebijakan dan kepentingan saling berkomunikasi dan berkolaborasi

dengan kesepakatan tertentu. Hal itulah yang kemudian dikenal menjadi Manajemen Network/ Manajemen Jaringan pada era sekarang. Penelitian ini nantinya juga akan menggunakan pendekatan *Bottom-Up* yang menyorot pada tenaga pendidik, kepala sekolah, orang tua siswa hingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali sebagai subjek penelitian bukan kepada pemerintah/ kementerian pusat. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian instrumen penelitian.

"Teori Manajemen Jaringan" (Network Management Theory) relevan karena fokusnya pada interaksi dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam konteks implementasi kebijakan. Berikut merupakan alasan penulis memilih Teori Manajemen Jaringan dalam menganalisis implementasi kebijakan kurikulum merdeka di jenjang sekolah dasar kategori penggerak :

- **Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan:** Teori Manajemen Jaringan menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja sama antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, termasuk guru, kepala sekolah, orang tua, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan lainnya.
- **Pemahaman Bersama:** Teori Manajemen Jaringan menekankan pentingnya pemahaman bersama antara pemangku kepentingan terkait tujuan, tanggung jawab, dan sumber daya yang terlibat dalam implementasi.
- **Dukungan Bersama:** Dalam teori ini, pemangku kepentingan dapat memberikan dukungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan bersama, termasuk mendukung implementasi kurikulum merdeka.
- **Koordinasi dan Komunikasi:** Konsep koordinasi dan komunikasi efektif antara pemangku kepentingan sangat relevan dalam konteks implementasi kebijakan pendidikan.
- **Pemantauan dan Evaluasi Bersama:** Teori ini mendorong pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan untuk memastikan pencapaian tujuan.

- **Fleksibilitas dan Adaptasi:** Implementasi kebijakan kurikulum merdeka dapat memerlukan penyesuaian dengan kondisi dan kebutuhan lokal, dan teori ini mengakomodasi fleksibilitas tersebut.

Dengan menggunakan Teori Manajemen Jaringan dalam studi ilmu pemerintahan, Penulis dapat menggali bagaimana kerja sama antar pemangku kepentingan, koordinasi, komunikasi, dan interaksi sosial memengaruhi implementasi kebijakan kurikulum merdeka di tingkat sekolah dasar. Ini dapat membantu dalam memahami dinamika dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

1.6.2 Model Implementasi Kebijakan

Penulis akan menggunakan salah satu teori Model Implementasi Kebijakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji efektivitas kesiapan implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten Boyolali yakni, Model Brian W. Hoogwood dan Lewis A.Gun (1978) Dalam Nugroho (2021). Konsep implementasi dapat dipahami dari beberapa aktor dan pemikir kebijakan publik seperti pada contohnya dari pernyataan Grindle (1980) dalam Akib (2010) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Implementasi Kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Jika dikaitkan dengan Kebijakan Kurikulum Merdeka, penulis hendak mendalami pola komunikasi dan kolaborasi yang terjadi antar aktor yang terlibat yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan dalam implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka. Model Brian W. Hoogwood dan Lewis A.Gun (1978) Dalam Nugroho (2021) yang menyebutkan setidaknya ada 10 syarat keberhasilan dalam implementasi kebijakan sebagai berikut:

1. **Adanya jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/ badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar.** Hal eksternal yang dimaksud disini ialah lembaga legislatif, dan masyarakat sipil yang mendukung/ menolak implementasi kurikulum baru ini.

2. Apakah untuk pelaksanaannya tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu. Sumber daya disini ialah sumber daya manusia, sarana/ prasarana, hingga proses pelaksanaannya tidak terburu-buru hingga terkesan dipaksakan. Sumber daya manusia terdiri dari Guru sebagai tonggak utama dalam hal transfer knowledge, serta kepala sekolah, penilik, dinas terkait hingga orang tua siswa dalam mendidik murid sepulangnya dari sekolah. Sarana prasarana disini ialah kesiapan fasilitas penunjang pendidikan di Jenjang Sekolah dasar ini seperti peralatan elektronik hingga jaringan internet yang memadai. Hal yang terakhir ialah tersedianya sumber daya waktu dalam proses pelaksanaan kebijakan ini, seperti adanya bimbingan teknis/ pelatihan yang dilakukan kepada guru, dan kepala sekolah demi tercapainya tujuan dalam kurikulum baru ini.

3. Apakah perpaduan antara sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. Kebijakan publik adalah kebijakan yang kompleks dan menyangkut dampak yang luas. Karena itu, dibutuhkan berbagai sumber (sumber daya atau sumber aktor). Jika ditarik kepada implementasi kurikulum merdeka yang cukup mengandalkan teknologi seiring perkembangan zaman, para tenaga pendidik (guru, kepala sekolah) dituntut untuk dapat menguasai teknologi itu untuk menunjang keberhasilan pembelajaran yang menggunakan paradigma baru ini.

4. Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal. Pada prinsipnya adalah apakah kebijakan itu dapat menyelesaikan permasalahan yang hendak ditanggulangi. Dalam latar belakang, salah satu penyebab kemunduran pendidikan di Indonesia adalah disebabkan oleh perubahan kurikulum seiring perkembangan zaman. Poin ini akan menjelaskan latar belakang dari pembuatan kurikulum baru ini (sebab-akibat). Kurikulum Merdeka ini juga akan diuji apakah akan menyelesaikan beberapa masalah vital dalam dunia pendidikan, atau bahkan malah menambah masalah sendiri ke depannya.

5. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Dugaan sementara jika semakin dikit hubungan 'sebab-akibat', semakin tinggi pula hasil yang hendak dicapai oleh kebijakan itu. Sebuah kebijakan yang punya hubungan kausalitas yang

kompleks, otomatis akan menurunkan efektivitas implementasi kebijakan. Kurikulum Merdeka ini hendak menyelesaikan masalah pendidikan yang sangat kompleks (bahkan sampai ke akar-akarnya). Mulai dari kesenjangan SDM tenaga pendidik, sarana/ prasarana hingga permasalahan rancangan pendidikan yang sangat kompleks. Asumsinya pada implementasi kebijakan kurikulum merdeka ini adakah karena memiliki hubungan kausalitas yang kompleks, maka efektivitas implementasi di lapangannya juga akan turun.

6. Apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Asumsinya jika hubungan saling ketergantungannya tinggi, justru implementasinya tidak akan berjalan secara efektif, apalagi jika hubungannya adalah hubungan ketergantungan. Jika dikaitkan dengan dunia pendidikan, Indonesia kini menerapkan konsep Desentralisasi di pemerintahannya, tak terkecuali pada bidang pendidikan. Pemerintah Pusat (Kemenristekdikti) berperan dalam merancang konsep kurikulum baru yang sesuai dengan perkembangan zaman , namun di lain sisi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (termasuk tenaga pendidik di dalamnya) pada setiap Provinsi juga berperan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam menyukseskan kebijakan ini. Jika banyak ketidaktahuan atau bahkan penolakan yang terjadi pada akar rumput, maka keberhasilan kebijakan ini akan sulit dicapai. Teori ini juga akan membedah konsep implementasi kebijakan secara bottom-up (dari bawah ke atas).

7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Poin ini seperti orang-orang yang berada di dalam suatu pesawat yang sama sepakat akan pergi ke sebuah tujuan yang sama. Namun, penumpang yang naik pesawat itu jika memiliki tujuan yang berbeda-beda apalagi tidak mampu memimpin, adalah suatu pesawat yang tidak pernah beranjak dari tempatnya berada. Jika ditarik pada kebijakan kurikulum merdeka, antara DPR RI dan Pemerintah Pusat (kemenristekdikti) pernah tidak sepakat terkait pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional/ Sisdiknas yang sangat berkaitan erat dengan kurikulum merdeka ini. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipaparkan dalam latar belakang diatas, ada juga ahli yang diundang oleh DPR yang menyatakan

ketidaksetujuannya terhadap kebijakan gonta-ganti kurikulum yang sudah terbukti dari tahun ke tahun tidak menyelesaikan masalah prioritas pendidikan. Hal ini tentunya menarik untuk terus didalami dan diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan *bottom-up*, dengan fokus ruang lingkup menjangkau respons dari tenaga pendidik sebagai garda terdepan sebagai aktor pelaksana kebijakan di satuan pendidikan.

8. Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. Tugas yang jelas dan prioritas yang hendak dicapai merupakan kunci efektivitas implementasi kebijakan. Hal ini menarik untuk diteliti karena dimana ada kebijakan baru terkait pendidikan, maka disitu akan terjadi perubahan kerja dan sistem pendidikan. Salah satunya ialah rapor penilaian yang berdasarkan skor kualitatif bukan angka/ standar KKM. Tenaga pendidik juga dituntut untuk melakukan Penyusunan Rencana Pembelajaran yang baru guna menyokong tujuan kurikulum baru ini untuk mencapai keterkaitan satu dengan yang lain. Asumsinya ialah hal ini dapat mengaburkan esensi utama yang seharusnya dilakukan tenaga pendidik yaitu mendidik bukan berfokus pada dunia administrasi.

9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Komunikasi merupakan perekat suatu organisasi, dan koordinasi adalah asal muasal dari kerjasama tim serta salah satu cara untuk dapat menumbuhkan sinergisitas. Ditengah maraknya konsep kompetisi untuk meningkatkan hasil/ capaian tujuan, hal komunikasi dan koordinasi juga sangat dibutuhkan demi mencapainya sinergisitas. Dalam hal pendidikan, setiap pengambil kebijakan dan pihak yang turut berpartisipasi harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Adanya penolakan dari beberapa guru dan pihak terkait kebijakan kurikulum baru ini tentunya harus segera diselesaikan dan diredam melalui komunikasi dan koordinasi antar pihak.

10. Pihak-pihak yang punya wewenang kekuasaan dapat menuntut dan dapat kepatuhan yang sempurna. Kekuasaan atau power merupakan syarat mutlak bagi

keefektifan implementasi kebijakan. Tanpa otoritas yang berasal dari kekuasaan, maka kebijakan akan tetap berupa kebijakan tanpa ada dampak yang jelas bagi target kebijakan. Hal disini ialah, kementerian dapat menuntut dinas pendidikan dan kebudayaan di setiap Provinsi untuk dapat membantu menyelesaikan implementasi kebijakan ini sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Penulis melakukan pengelompokan/ penggabungan dari total 10 poin syarat keberhasilan suatu kebijakan, menjadi 3 poin utama dengan harapan agar pembaca dapat lebih memahami kesiapan implementasi kebijakan dengan cara meringkas tanpa menghilangkan nilai pentingnya, sebagai berikut :

- A. Analisis adanya dukungan/ tidak dari pihak eksternal terhadap perubahan kurikulum (penerimaan/penolakan) dan pola ketergantungannya (besar/ kecil). (poin 1, 6, 7, dan 10)
- B. Analisis kualitas Sumber Daya Manusia (tupoksi yang dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar), kondisi sarana dan prasarana penunjang kurikulum, dan proses waktu implementasi apakah terburu-buru/ tidak (poin 2 dan 8), serta
- C. Analisis hubungan keterkaitan antar elemen (komunikasi antar tenaga pendidik, optimalisasi penggunaan IPTEK) beserta efektifitas/ dampak yang dirasakan (poin 3, 4, 5, 9, dan 10)

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi kasus. Studi kasus dipakai untuk meneliti kesiapan implementasi, dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan Kurikulum Merdeka di jenjang pendidikan sekolah dasar se-Kabupaten Boyolali. Peneliti mengambil topik kesiapan implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka ini karena sudah terbukti pada penelitian sebelumnya terkait studi beberapa implementasi kurikulum di Indonesia yang membuktikan bahwa butuh waktu yang cukup lama untuk dapat benar-benar melaksanakan konsep yang ditulis diatas kertas, bahkan ada beberapa konsep kurikulum 2013 Revisi yang belum optimal dilaksanakan, tapi sudah mengganti menjadi kurikulum baru seperti salahsatunya ialah peningkatan softskill ketimbang hardskill yang masih sangat kurang dirasakan untuk bersaing secara global (Anas. 2014)

Peneliti mengambil wilayah penelitian di Kabupaten Boyolali karena masih terdapat kendala kesiapan IPTEK dalam penerapan kurikulum merdeka ini yang justru sangat mengandalkan IPTEK sebagai salah satu faktor keberhasilannya, serta kurangnya partisipasi dalam Program Sekolah Penggerak yang tercatat per Februari 2023 baru terdapat 31 Sekolah dasar yang berkategori sekolah penggerak dari total 580 Sekolah dasar yang tersebar se-Kabupaten Boyolali.

Dalam rangka melengkapi metode kualitatif melalui studi kasus ini, nantinya peneliti akan menghimpun data kualitatif yang berasal dari observasi lapangan, wawancara/ depth interview dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, dan beberapa orang yang berkepentingan seperti kepala sekolah SD, Penilik/ Pengawas, dan kepala seksi kurikulum. Penulis juga akan melakukan studi pustaka, dan studi audio/ video rekaman

dari berbagai sumber untuk saling melengkapi dan membandingkan antara konsep dan hasil implementasi di lapangan.

1.8.2 Situs Penelitian

Peneliti akan menetapkan situs penelitian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dan beberapa Sekolah Dasar yang tersebar di Kabupaten Boyolali yang menjadi sampel penelitian nantinya serta beberapa sekolah dasar yang akan dijadikan sampel nantinya.

1.8.3 Subjek Penelitian

Peneliti mengambil sampel 10 Sekolah Dasar yang merupakan bagian dari Program Sekolah Penggerak/ Kategori sekolah penggerak dari total 31 Sekolah Dasar yang tersebar di Kabupaten Boyolali. Peneliti melakukan stratifikasi cluster dalam pengambilan sampel objek penelitian antara wilayah desa/ kota, pinggiran/ sentral kota, dan sekolah kategori swasta/ negeri. Sampai Agustus 2023, terdapat 31 Sekolah Dasar berkategori penggerak yang tersebar di 16 Kecamatan di Kabupaten Boyolali dari total 22 Kecamatan. Peneliti mengambil sampel sebanyak 10 Sekolah Dasar kategori penggerak di 10 Kecamatan yang berbeda, sebagai berikut :

Tabel 1.1 Tabel sebaran sampel penelitian Sekolah Penggerak di Kabupaten Boyolali

NO	NAMA SEKOLAH	INFORMAN	KECAMATAN
1	SD Negeri 1 Andong	2 orang	Andong
2	SD Negeri 8 Boyolali	3 orang	Boyolali
3	SD Negeri 2 Kembang	1 orang	Gladagsari
4	SD Negeri 2 Jerukan	3 orang	Juwangi
5	SD Negeri Sempulur	1 orang	Karanggede
6	SD Negeri 4 Wonoharjo	3 orang	Kemusu
7	SD Negeri 1 Donohudan	2 orang	Ngeplak
8	SDIT Al Firdaus Nogosari	1 orang	Nogosari
9	SD Negeri Senden	3 orang	Selo
10	SD Negeri 2 Kalinanas	2 orang	Wonosamodro

TOTAL	21 orang
--------------	-----------------

Sebagian besar sampel sekolah tersebut berada pada lintasan desa dan mayoritas berstatus sebagai Sekolah Dasar Negeri (SDN). Dari kesepuluh sekolah yang tersebar di 1 kabupaten itu, setidaknya peneliti menyasar 1 guru pelaksana kurikulum merdeka/ satu kepala sekolah yang sama-sama menjadi tonggak tumpuan keberhasilan implementasi kurikulum baru ini di lapangan. Adapun total informan berjumlah 24 orang (21 tenaga pendidik ditambah 3 orang dari dinas) yang terdiri sebagai berikut :

- A. 1 orang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali.
Darmanto
- B. 1 orang Kepala Seksi/ Kepala Bidang Kurikulum Jenjang Sekolah Dasar
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, Basuki

C. 1 orang pengawas sekolah/ penilik di Kabupaten Boyolali, Kuswinarni

D. 6 orang kepala sekolah, dan 15 orang guru jenjang SD yang berkategori sekolah penggerak dari sampel 10 unit sekolah yang tersebar di Kabupaten Boyolali sebagai berikut:

- 1 guru wali kelas IV di SDN Sempulur, Kecamatan Karanggede
- 1 guru Wali kelas IV di SDN 2 Kembang, Kecamatan Gladagsari
- 1 kepala sekolah SD Islam Terpadu Al Firdaus Nogosari, Kecamatan Nogosari
- 1 guru wali kelas 1 & 1 guru wali kelas IV di SDN 01 Andong, Kecamatan Andong
- 1 guru wali kelas 1 & 1 guru wali kelas IV di SDN 1 Donohudan, Kecamatan Ngemplak
- 1 kepala sekolah dan 1 guru wali kelas IV di SDN 2 Kalinanas, Kecamatan Wonosamodro
- 1 kepala sekolah, 1 guru wali kelas I dan I guru wali kelas IV di SDN Senden, Kecamatan Selo
- 1 kepala sekolah, 1 guru wali kelas I dan I guru wali kelas IV di SDN 8 Boyolali, Kecamatan Boyolali
- 1 kepala sekolah, 1 guru wali kelas I dan I guru wali kelas IV di SDN 2 Jerukan Kecamatan Juwangi
- 1 kepala sekolah, 1 guru wali kelas I dan I guru penggerak wali kelas V di SDN 4 Wonoharjo, Kecamatan Kemusu

Rata-rata usia informan erada pada usia 30-40 tahun dan memiliki rata-rata pengalaman mengajar sudah lebih dari 5 tahun (paling lama sudah mengajar selama 32 tahun,yakni ibu Sumarni sebagai wali kelas I di SDN 2 Jerukan, dan yang paling baru mengajar selama 1 tahun yakni Ibu Dewi Yuliana di sebagai wali kelas IV di SDN Jerukan). Peneliti setidaknya juga mendalami kesiapan implementasi

kebijakan kurikulum merdeka ini melalui 15 poin pertanyaan (fleksibel) dalam wawancara mendalam/ *depth interview*.

Penulis juga membagi dua pihak yang terdampak pada kebijakan kurikulum ini menjadi pihak internal dan pihak eksternal, sebagai berikut :

A. Pihak Internal (terdampak langsung secara aktif di lapangan)

- Guru dan Kepala sekolah sebagai pihak kedua sekaligus ujung tombak keberhasilan kebijakan Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan (Sekolah Dasar)
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali
- Fasilitator yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Pemerintah Pusat)
- Penilik (pengendali mutu dan evaluasi)/ Pengawas Sekolah Dasar dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali

B. Pihak Eksternal (terdampak secara tidak langsung secara pasif bagi pelaksanaan dan keberhasilan kurikulum merdeka)

- Orang tua/wali murid sebagai pihak pertama dan utama keberhasilan tujuan pendidikan di rumah (kehidupan sehari-hari)

Adapun daftar pertanyaan yang dipakai peneliti kepada guru dan kepala sekolah adalah sebagai berikut :

1. Identitas sekolah dan narasumber (nama, usia, gelar, lama mengajar)
2. Bagaimana kondisi kegiatan belajar-mengajar setahun terakhir (belakangan ini), apakah ada perbedaan yg dirasakan oleh tenaga pendidik ?
3. Apakah beban tanggung jawab administrasi/ beban kerja anda lebih berat belakangan ini ? (hal penyusunan rencana pembelajaran, pelaksanaannya hingga evaluasi)
4. Kira-kira menurut anda, apa perbedaan kurikulum sebelumnya dengan kurikulum saat ini ?
5. Apa yang anda ketahui tentang Kurikulum baru ? Dari mana anda mengetahui Kurikulum baru ini ? Pelatihan ? Belajar Mandiri ?
6. Bagaimana tanggapan/ respons anda terhadap kurikulum merdeka ini ?
7. Seberapa sering anda mengakses internet ketika proses belajar-mengajar sedang berlangsung ?
8. Apa yang anda ketahui tentang 'Platform Merdeka Mengajar' ? (Apa saja isinya?) *skor maksimal 7
9. Seberapa sering anda mengakses Platform tersebut ? (setiap hari, seminggu 1-2 kali, sebulan sekali)
10. Bagaimana kondisi/ perkembangan Saprass ? (ruang laboratorium komputer, WIFI sekolah, alat/ instrumen pembelajaran yang dimiliki tenaga pendidik). Alokasi dana BOS kinerja ?

11. Apakah pergantian kurikulum ini mengganggu proses belajar-mengajar belakangan ini ?
12. Apakah anda setuju terhadap kebijakan pergantian kurikulum ini ? (skala 1-10)
13. Apakah lebih membantu/ menyulitkan anda dalam hal transfer knowledge kepada peserta didik ?
14. Seberapa yakin anda bahwa IKM ini dapat membenahi masalah pendidikan di Indonesia ? (skala 1-10)
15. Bagaimana hubungan sekolah/ individu dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Boyolali ? Apa kira-kira peran Dinas pendidikan dan kebudayaan ? Apa peran fasilitator dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ?



Gambar 1.1 Foto tembok salah satu SD Negeri kategori penggerak sebagai sampel penelitian yang berada di jalur lintasan pusat kota di Kabupaten Boyolali, SDN 8 Boyolali

1.8.4 Jenis Data Penelitian

Penelitian kualitatif ini akan menggunakan data berupa teks, kata-kata tertulis, frasa- frasa/ simbol yang menggambarkan/ merepresentasikan orang-orang, tindakan-tindakan dan peristiwa dalam kehidupan sosial.

1.8.5 Sumber Data

Terdapat 2 sumber data yang akan dipakai nantinya, yakni data primer (yang berasal dari observasi lapangan dan wawancara) dan data sekunder (yang berasal dari studi pustaka, studi audio/ suara).

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti nantinya akan mengumpulkan data sesuai dengan panduan dalam Creswell (2016) melalui proses sebagai berikut :

A. Wawancara mendalam/ depth interview, peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa subjek penelitian seperti Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali dan Kepala Seksi Kurikulum Jenjang SD, serta beberapa guru, kepala sekolah, dan penilik/ pengawas di beberapa sampel sekolah dasar yang berkategori sekolah penggerak yang tersebar di Kabupaten Boyolali.

B. Observasi lapangan, peneliti akan melakukan pemantauan langsung ke beberapa lokasi sekolah dasar yang berkategori sekolah penggerak yang tersebar di Kabupaten Boyolali untuk memperkuat data.

C. Studi pustaka, peneliti akan mendalami beberapa dokumen peraturan perundang-undangan, serta buku offline dan online melalui platform online perpustakaan nasional, Teknik ini merupakan bagian dari data sekunder yang akan dikumpulkan penulis

D. Studi audio/ video, peneliti juga akan merekam informasi dari partisipan dengan menggunakan catatan tangan dengan audiotape, atau dengan videotape. Peneliti juga akan mengambil beberapa sumber dari Youtube. Teknik ini merupakan bagian dari data sekunder yang akan dikumpulkan penulis

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Peneliti akan menggunakan strategi studi kasus dengan theory guided untuk menganalisis dan menginterpretasikan data tekstual. Analisis melalui theory guided dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan pengetahuan yang tersebar diantara berbagai metodologi penelitian. Dalam melakukan integrasi dalam pengetahuan yang berasal dari berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan melalui data empirik dan studi studi literature sudah terbukti sebagai jalan untuk memperluas pengetahuan yang sudah ada sebelumnya menuju pengetahuan baru (Samulowitzh, 2018). Peneliti nantinya akan menggunakan teori implementasi sebagai pisau analisis dalam membedah kesiapan implementasi kebijakan kurikulum merdeka ini yang sangat berkaitan dengan tingkat dan kualitas pengajaran oleh guru di beberapa sekolah dasar di Kabupaten Boyolali.